

USULAN PROPOSAL PENELITIAN



Judul Penelitian:

KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BUNGO PADA MASA PANDEMI COVID-19

Oleh:

Dr. Sesarria Yuvanda, SP., ME NIDN 1001077601

Siswoyo, SE, MSi NIDN 1022017301

Dibiayai oleh:

Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2021/2022

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI TAHUN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo Pada Masa Pandemi Covid-19
2. Peserta Program : Penelitian Internal
3. Tim Penelitian
 - a) Ketua Tim Peneliti
 - a. Nama : Dr. Sesarria Yuvanda, SP., ME
 - b. NIDN : 1001077601
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
 - b) Anggota Peneliti
 - a. Nama : Siswoyo, SE., MSi
 - b. NIDN : 1022017301
 - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
4. Lokasi Kegiatan : Provinsi Jambi
5. Lama Penelitian : 7 Bulan
6. Biaya Total Penelitian : 2.500.000,-
 - Dana Internal : 1.500.000,-
 - Dana Eksternal : 1.000.000,-

Mengetahui,
Ka Prodi Ekonomi Pembangunan

Jambi, 23 Desember 2021
Peneliti,

(Ratih Rosita, SE, MSi)
NIDN. 1011118603

(Dr. Sesarria Yuvanda, SP., ME)
NIDN. 1001077601

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi

(Prima Audia Daniel , SE, ME)
NIDK.8852530017

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Tercatat tahun 2019 penerimaan asli daerah di seluruh Indonesia sebesar 169.993 milyar rupiah dan turun menjadi 148.711 milyar rupiah pada tahun 2020. Artinya PAD pada masa pandemic Covid 19 terjadi penurunan sebesar 12,51 %.

Kondisi penerimaan PAD yang tergambar di Indonesia tidak jauh berbeda untuk provinsi Jambi. Penerimaan PAD Provinsi Jambi pada tahun 2019 sebesar 1,651 trilyun namun pada tahun 2020 PAD provinsi Jambi menurun menjadi 1,535 trilyun yang artinya terjadi penurunan PAD sebesar 3.83 %.

Dampak pandemic Covid-10 juga dirasakan oleh kabupaten Bungo dimana tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo mengalami penurunan, hal ini diakibatkan oleh adanya wabah pandemi Covid-19. Covid-19. Penerimaan PAD kabupaten Bungo ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Dalam Situasi
Pra- Pasca Pandemi Covid-19 Tahun 2018 - 2020

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah)	Perkembangan
1	2018	Rp. 133.848,46	-26,91%
2	2019	Rp. 140.327,48	4,84%
3	2020	Rp. 126.132.86	-10,11%

Sumber : Kabupaten Bungo Dalam Angka Tahun 2021

Data yang disajikan pada tabel 1.1 tersebut memberi gambaran bahwa diperlukan kebijakan khusus guna meningkatkan PAD dimasa pandemi covid-19 di kabupaten Bungo.

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan deskripsi yang di muat dalam latar belakang maka dirumuskan pointer permasalahan adalah

1. Apakah ada perbedaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bungo sebelum dan saat pandemic Covid – 19
2. Kebijakan apakah yang dapat digunakan untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Muaro Bungo pada masa Pandemi Covid-19

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis perbedaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bungo sebelum dan saat pandemic Covid - 19
2. Untuk Merumuskan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Bungo Pada Masa Covid - 19

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis : menumbuhkembangkan ilmu keuangan daerah
2. Manfaak Praktisi : Masukan bagi pemerintah kabupaten Bungo untuk merumuskan kebijakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah akibat pandemic covid - 19.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Perekonomian Daerah

Perekonomian Daerah diartikan sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya daerah dimulai dari proses produksi, distribusi dan konsumsi yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Bentuk ekonomi daerah dapat dilihat dengan memakai PDRB sebagai indikatornya.

2.1.2. Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan membiayai pembangunan daerah. Instrumen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Halim, A (2007), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Pajak Daerah
 - a. Pajak Provinsi
 - b. Pajak Kabupaten/ Kota
- 2) Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (public service function), dan melaksanakan pembangunan (development function). Namun kenyataan rata-rata penerimaan PAD diseluruh provinsi di Indonesia tahun 2020 hanya mencapai 44,65% dari anggaran Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kemandirian daerah tersebut masih rendah dan masih tergantung pada pemerintah pusat.

Nafsi Hartoyo (2017) menyatakan rendahnya penerimaan PAD disebabkan oleh faktor pertama, kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Kedua, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah. Ketiga, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Keempat, kelemahan kualitas SDM aparatur. Kelima, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya. Keenam, ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Ketujuh, sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (mark up) sejak awal pada setiap anggarannya. Padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin, maka sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang komprehensif tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Hubungannya Dengan Ekonomi Daerah Kabupaten Kota Diprovinsi Jambi belum didapat. Penelitian yang telah ada didapati meneliti secara parsial saja.

Astuti, H.W, dkk (2021) melakukan penelitian analisis penerimaan pajak daerah provinsi Lampung pada masa pandemic Covid – 19. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak daerah selama pandemic Covid – 19. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Lampung telah mengambil kebijakan berupa keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.

Safitra, N (2019) dengan penelitian berjudul Strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di kabupaten Enrekang. Hasil penelitian memaparkan bahwa untuk peningkatan Pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan strategi dengan memperbaiki aspek kelembagaan/pengelolaan pendapatan asli daerah, Aspek ketatalaksanaan yakni peningkatan jumlah wajib pajak, menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional, serta Aspek Personalianya yakni meningkatkan mutu sumberdaya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah, Upaya Ekstensifikasi dilakukan dengan Penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

2.3. Karangka Pikir

Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah maka diupayakan menggali sumber-sumber potensi penerimaan daerah. Salah satu bentuk penerimaan daerah yaitu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Pada saat Pandemi Covid 19 ini terjadi Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah banyak faktor yang mempengaruhinya. Secara teknis faktor tersebut akan berhubungan dengan instrument penerimaan PAD yang diperbolehkan menurut UU No 28 tahun 2008 yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Skema kerangka pikir dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 3.1. Skema Kerangka Pikir



2.4. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Diduga terdapat perbedaan pendapatan asli daerah kabupaten Bungo sebelum dan saat masa pandemic Covid – 19.

BAB III. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Data Sekunder dan obeservasi. Yang dimaksud dengan metode penelitian Analisis Data Sekunder adalah suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama. Memanfaatkan data sekunder yang dimaksud yaitu dengan menggunakan sebuah teknik uji statistik yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang diinginkan yang bersumber dari instansi terkait.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bungo. Untuk data sebelum masa Pandemi dibutuhkan data 2015 – 2019. Sedangkan data penerimaan pendapatan asli daerah saat pandemic covid 19 dibutuhkan data tahun 2020 – 2021.

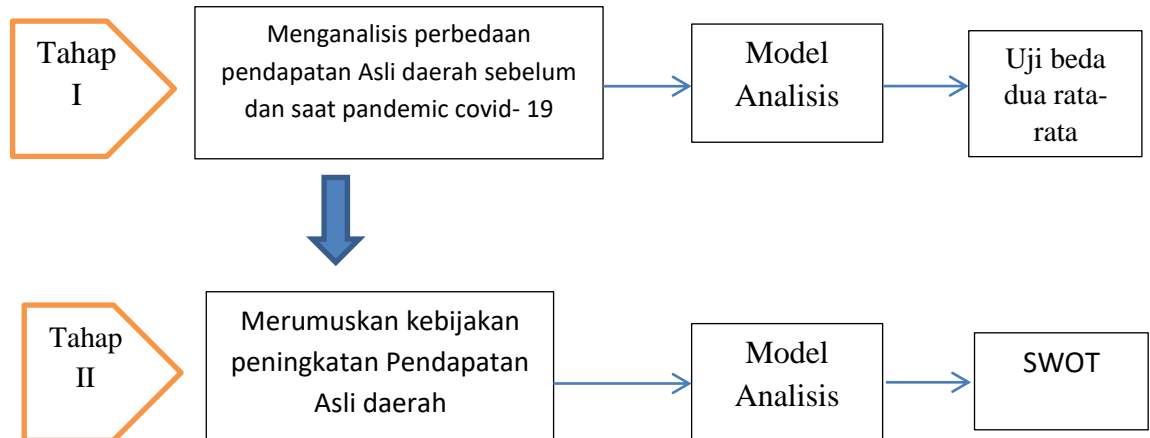
3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Bungo pada masa pandemic covid 19 akan dilakukan selama 7 (tujuh) bulan dengan 2 kategori tahapan kegiatan. Kedua kategori tersebut adalah:

1. Menganalisis uji beda pendapatan asli daerah sebelum dan saat pandemic covid - 19
2. Merumuskan kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah pada saat masa pandemic Covid - 19

Hubungan setiap tahapan kegiatan dengan keluaran akan tergambar dalam Bagan Penelitian secara keseluruhan. Bagan alur tersebut disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1. Bagan Penelitian



3.5. Model Analisis Data

3.5.1. Model Analisis Pertama

Untuk menjawab tujuan pertama yaitu menganalisis perbedaan pendapatan asli daerah sebelum dan saat pandemi maka digunakan uji beda dua rata-rata. Uji beda merupakan sebuah teori dalam statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu nilai tertentu (yang diberikan sebagai pembanding) berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji t mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan atau berpasangan (Paired Sample T-test)

3.5.2. Model Analisis Kedua

Untuk merumuskan kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Bungo pada masa pandemic Covid – 19 maka digunakan analisis SWOT. Adapun formulasi analisis SWOT dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL				STRENGTH (Kekuatan) 1. 2. 3.	SKOR			WEAKNESS (Kelemahan) 1. 2. 3.	SKOR		
					1	2	Dst		1	2	dst
Faktor Eksternal											
OPPORTUNITY (Peluang) 1. 2. 3.	SKOR			STRATEGI SO Strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya			STRATEGI WO Strategi yang memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada				
	1	2	dst								
THREAT (Ancaman) 1. 2. 3.	SKOR			STRATEGI ST Strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman			STRATEGI WT Strategi yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman				
	1	2	dst								

BAB 5. JADWAL DAN ANGGRAN PENELITIAN

Penelitian tentang kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bungo pada masa pandemic Covid - 19, direncanakan memerlukan waktu 7 bulan. Deskripsi alokasi waktu untuk penelitian tersebut dimuat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Alokasi Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan proposal							
2	Pengumpulan data sekunder							
3	Pengolahan dan analisis data							
4	Penyusunan laporan							
5	Seminar dan publikasi hasil penelitian							

Dalam penelitian ini rencana anggaran biaya yang dibutuhkan adalah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Rencana penggunaan anggaran biaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 2. Rincian Anggaran Biaya Penelitian

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Gaji dan Upah	1.000.000
2	Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan/laporan/publikasi	500.000,-
3	Perjalanan	500.000,-
4	sewa peralatan/mesin/peralatan penunjang penelitian	500.000,-
	JUMLAH	2.500.000,-

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, H.W., Murniati., Haninum dan Nurdiawansyah. (2021). Analisis Penerimaan Pajak daerah Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Visionist* Vol. 10 Nomor 1.
- Halim, A (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta
- Lutfiyah, (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*. Vol 4 No. 2
- Lypsey (1997). Pengantar Makro Ekonomi. Jilid dua. Bina Rupa. Aksara. Jakarta.
- Kurniawan, A.I. - Militina, T & Suharto, R. B. (2017). Pengaruh Investasi Swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan manajemen*. Vo. 13 No. 2
- Mankiw, N. G. (2000). Teori Makro Ekonomi. Erlangga. Jakarta
- Paramasivan, C. P & Mari S. (2013). Progress and Performance of Micro, Small and Medium Entreprises in India. *International Journal of Manajement Studies*, 2(4).
- Setiawan, B. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 serta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. Tesis. Universitas Jambi.
- Sutha, (2000). Menuju Pasar Modal Modern. Yayasan Sad Satria Bakhti, Jakarta